

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pemberlakuan Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Republik Indonesia merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 32/1999 yang direvisi menjadi UU No. 25/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 32/2004 yang direvisi menjadi UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Secara umum, aktivitas pemerintah ditujukan untuk mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong sumber daya dari potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Pemerintah juga mengupayakan untuk memperbaiki motivasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang paling rendah yang mempunyai informasi yang paling lengkap.

Kantor dinas sebagai sub unit organisasi yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, menerima peran pengambilan keputusan, melaksanakan keputusan dan bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan.

Sistem pengendalian akuntansi bisa meningkatkan perencanaan dan kontrol aktivitas organisasi (Miah dan Mia, 1996 dalam Irfansyah, 2003). Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan rencana tertentu dan memilih alternatif terbaik dari setiap kasus, sehingga bisa meningkatkan kinerja (Miah dan Mia, 1996; Andriani, 2001 dalam Irfansyah, 2003). Beberapa peneliti terdahulu yang mendukung hasil penelitian tersebut antara lain Miah dan Goyal (1990); Martin (1994); Macintosh (1994); Cushing dan Romney (1994) dalam Irfansyah (2003). Sebagian besar riset yang dipublikasikan menunjukkan bahwa memang keefektifan sistem pengendalian, atau pengaruh sistem pengendalian terhadap kinerja ditentukan oleh *contextual factor*, seperti motivasi, komitmen, struktur organisasi, ketidak pastian lingkungan dan strategi. Meskipun temuan yang ada sudah mendukung sistem pengendalian yang bersifat kontinjen, namun mengingat berbagai penelitian yang ada sebagian besar hanya menekankan satu atau dua dimensi saja dari sistem pengendalian, temuan-temuan ini masih bersifat parsial dalam menjelaskan nilai ekonomis atau kegunaan sistem pengendalian bagi perusahaan secara keseluruhan. Seperti yang diutarakan Otley (1980) yang dikutip dalam Riyanto (2003), sistem pengendalian dan konteksnya merupakan satu kesatuan yang harus dievaluasi sebagai satu kesatuan. Sistem pengendalian manajemen merupakan salah satu sistem informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan aktivitas, dan untuk

beradaptasi dengan lingkungan serta untuk menjamin bahwa tujuan akan bisa dicapai dengan baik (Gordon and Miller, 1976; Waterhouse and Tiessen, 1978; Kaplan, 1984; Anthony et al., 1989; Atkinson et al., 1995 dalam Riyanto, 2003). Gul dan Chia (1994) dalam Riyanto (2003) menemukan bahwa struktur organisasi mempengaruhi hubungan antara desain akuntansi manajemen dengan kinerja.

Dalam memperbaiki kinerja manajerial, aspek sumber daya manusia menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal ini disebabkan dampak interaksinya terhadap pelayanan masyarakat, sehingga faktor yang mempengaruhi individu dalam organisasi merupakan hal yang patut dipertimbangkan dalam menentukan strategi organisasi dalam meningkatkan kinerjanya. Beberapa penelitian terdahulu menerangkan bahwa, untuk meningkatkan pencapaian kinerja, selain menggunakan sistem pengendalian manajemen (Anthony dan Govindrajan, 1998 dalam Irfansyah, 2003) dan sistem pengendalian akuntansi (Miah dan Mia, 1996 dalam Irfansyah, 2003) juga dipengaruhi oleh karakteristik personal yaitu *locus of control* (Brownell, 1982 dalam Irfansyah, 2003. Siegel dan Marconi (1989) dalam bukunya *Behavioral Accounting* (Rahman, 2001 dalam Irfansyah, 2003), menyatakan bahwa variabel personalitas dapat berinteraksi dengan variabel *cognitive* untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Variabel personalitas mangacu pada sikap dan keyakinan individual yang diwujudkan dalam karakteristik personalitas, sedang variabel *cognitive* mangacu pada cara atau metode dimana individu menerima, menyimpan, memproses dan mentransformasikan informasi kedalam tindakannya.

Zammuto dan Bedeian (1991) dalam Irfansyah (2003) menyatakan bahwa perubahan organisasi berpengaruh terhadap perilaku individu di organisasi dalam menyikapi perubahan tersebut (*resistance to change*). Organisasi pemerintahan mempunyai kecenderungan yang sama, yaitu birokratis, hirarki, dan kaku. Sifat organisasi tersebut membuat karakteristik individu dalam organisasi pemerintahan cenderung mempercayai bahwa resiko mereka dikendalikan oleh keberuntungan atau kesempatan, dan mengharuskan mereka taat akan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan sistem peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur situasi kondisi dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman (Mardiasmo, 2000; Whitfield, 1992 dalam Irfansyah, 2003).

Motivasi didefinisikan sebagai derajat sampai dimana seorang individu ingin berusaha untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik (Mitchell, 1982 dalam Irfansyah, 2003). Hasil penelitian yang dilakukan (Mia, 1988 dalam Riyadi, 2000) menyimpulkan bahwa motivasi secara positif signifikan berperan sebagai variabel *moderating* dalam hubungan antara anggaran partisipatif dengan kinerja manajerial. Sementara hasil penelitian Milani (1975); Kenis (1979); Riyanto (1996) dalam Riyadi (2000), menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan diantara keduanya, sedang beberapa penelitian lain melaporkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut bertolak belakang atau negatif (Sterdy, 1960; Bryan dan Lucke, 1997 dalam Riyadi, 2000). Govindrajan (1986a) dalam Riyadi (2000), mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan perbedaan dari berbagai hasil penelitian tersebut, bisa dilakukan dengan

menggunakan pendekatan kontinjensi. Pendekatan ini secara sistematis mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Dalam penelitian ini, pendekatan kontinjensi akan diadopsi untuk mengevaluasi keefektifan hubungan kedua variabel, yang mana kedua variabel tersebut dipengaruhi oleh sifat individu seperti *locus of control* (Brownell, 1981, 1982a dalam Riyadi, 2000), motivasi (Brownell dan McInnes, 1986; Mia, 1988 dalam Riyadi, 2000) dan sikap terhadap pekerjaan dan perusahaan (Milani, 1975; Mia, 1988 dalam Riyadi, 2000). Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) dalam Lucyanda (2001), variabel *intervening* adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung, sedangkan variabel *moderating* adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mencoba mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu untuk mengetahui **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*”**.

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem pengendalian akuntansi akan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial?
2. Apakah variabel motivasi akan berpengaruh positif signifikan dalam memoderasi hubungan antara sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris bahwa sistem pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.
2. Memberikan bukti empiris bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan dalam memoderasi hubungan sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi masukan bagi praktisi dan para pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan strategi pencapaian kinerja pada organisasi pemerintah.
2. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk penelitian dibidang organisasi pemerintahan pada masa yang akan datang.